

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendalami dan menganalisis fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep dalam pembangunan Desa Wisata dengan menggunakan teori yang dikemukakan Calvin MacKenzie tentang fungsi pengawasan lembaga perwakilan yang meliputi legislasi, representasi dan pengawasan administratif. DPRD Sumenep memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data secara observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) DPRD Sumenep melakukan pengawasan legislasi membuat peraturan daerah (perda) tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang bertujuan mengotrol dan mengatur pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Sumenep, namun masih belum bisa diimplementasi karena masih dalam tahap evaluasi oleh Pemerintah Provinsi. 2) DPRD Sumenep masih belum memaksimalkan pengawasan representasi karena mayoritas anggota dewan terpilih didasarkan pada cost politik, bukan didasarkan kompetensi dan kapasitas yang menyebabkan tubuh DPRD Sumenep terjadi krisis SDM. 3) Pengawasan yang dilakukan DPRD Sumenep melakukan pengawasan administratif berdasarkan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD meliputi hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, serta melakukan rapat evaluasi bersama pemerintah eksekutif dengan cara mengevaluasi laporan-laporan Bupati dalam LKPJ.

Kata kunci : Fungsi Pengawasan DPRD, Pembangunan, Desa Wisata

ABSTRACT

This study aims to explore and analyze the supervisory function of the Sumenep Regional People's Representative Council (DPRD) in the development of Tourism Villages using the theory proposed by Calvin MacKenzie about the supervisory function of representative institutions which includes legislation, representation and administrative supervision. The Sumenep DPRD has the authority to carry out supervisory functions over Regional Government, as stated in Law (UU) Number 27 of 2009 concerning MPR, DPR, DPD, and DPRD, as well as UU Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The research method in this study uses descriptive qualitative methods by collecting data by observation, interviews or interviews and documentation. The results of the research in this study show that: 1) The Sumenep DPRD supervises legislation making regional regulations (perda) on Tourism Village Empowerment which aims to control and regulate the development, development and management of Tourism Villages in Sumenep Regency, but it still cannot be implemented because it is still in the evaluation stage by the Provincial Government. 2) The Sumenep DPRD still has not maximized representation supervision because the majority of elected council members are based on political costs, not based on competence and capacity which causes the Sumenep DPRD body to experience an HR crisis. 3) Supervision carried out by the Sumenep DPRD conducts administrative oversight based on UU Number 27 of 2009 concerning MPR, DPR, DPD, and DPRD including the right of interpellation, the right to questionnaire and the right to express opinions, as well as conducting evaluation meetings with the executive government by evaluating the reports of the Regent in the LKPJ.

Keywords: DPRD Oversight Function, Development, Tourism Village